

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abureaera, Sukarno, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Asgart, Sofian M., dkk. *Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: DEMOS, 2009.
- Asshidiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bahri, Teuku S., *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A., *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control*, Connecticut: Yale University Press, 1982.
- Daman, Rozikin, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Gambert, Tobias dkk., *Landasan Sosial Demokrasi*, Jakarta: Friedrich-Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2009.
- Gede Atmadja, I Dewa, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2011.
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Pers & Citra Media, 2006.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mahfud, Moh., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mahfud, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Moonti, Roy Marthen, *Ilmu Perundang-Undangan*, Makassar: Keretakupa, 2017.
- Noer, Delia, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, cetakan ke-2, Bandung: Mizan, 1997.
- Puspito, Nanang T. dkk., *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011.
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1993.
- Suleman, Zulkifli, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010.
- Soemitro, Rommy H., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Tjakrawerdaja, Subiakto dkk., *Demokrasi Pancasila: Sebuah Risalah*, Jakarta, Universitas Trilogi, 2016.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/P/HUM/2018.

Jurnal

Sekkat, Khalid & Meon, Pierre-Guillaume, 2005, *Does Corruption Grease or Sand the Wheels of Growth?*, Public Choice, 122, 69-97.

Hadityo Anugrah Allahi, Fathur Rahman, 2020, Kandidasi Calon Anggota Legislatif Koruptor, Refleksi atas Pemilu 2019 di Malang, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 5, Nomor 1.

Jana Kunicova dan Susan Rose-Ackerman, 2005, *Electoral Rules and Constitutional Structures as Constraints on Corruption*, Cambridge University Press, Vol 35.

Andhika Yuli Rimbawan, 2019, Pemilihan Umum dan Pemberantasan Korupsi, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, Nomor 2.

Jeffrey Alexander Ch. Lkadjia, 2019, Memaknai “Hukum Negara (*Law Through State*)” dalam Bingkai “Negara Hukum (*Rechtsstaat*)”, Hasanuddin Law Review, Vol. 1, Nomor 1.

Awaluddin, 2014, Konsepsi Negara Demokrasi yang Berdasarkan Hukum, Jurnal Academica:Universitas Tadulako, Kota Palu.

Syahriza Alkohir Anggoro, 2019, Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10, Nomor 1.

Agus Dedi, 2019, Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak, Jurnal Moderat, Vol. 5, Nomor 3.

Muntoha, 2009, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, Vol. 16, Nomor 3.

Laman Website

<https://homepage.ntu.edu.tw/~kslin/macro2009/Mauro%201995.pdf>

<https://www.kai.or.id/berita/14373/koneksitas-negara-hukum-dan-demokrasi.html>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-demokrasi-perwakilan/62611>

https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_di_Indonesia#:~:text=Demokrasi%20di%20Indonesia%20adalah%20suatu,Mohammad%20Hatta%2C%20dan%20Soetan%20Sjahrir.

<https://www.kai.or.id/berita/18581/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180523001204-32-300504/dpr-pemerintah-dan-bawaslu-eks-koruptor-boleh-jadi-caleg>

<https://www.liputan6.com/news/read/3588216/ada-larangan-kpu-eks-napi-korupsi-wa-ode-nurhayati-nekat-jadi-caleg>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/23015311/ma-seharusnya-larangan-eks-koruptor-diatur-dalam-undang-undang?page=all>

<https://antikorupsi.org/id/article/pkpu-diundangkan-kpu-harus-siap-hadapi-gugatan-ke-ma>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/184796/mantan-napi-korupsi-boleh-nyaleg-ini-langkah-icw>

<https://tirto.id/icw-minta-dpr-tidak-intervensi-kpu-di-pemberlakuan-pkpu-20-2018-cNA1>

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1225-problematika-pkpu-no-20-tahun-2018-mantan-koruptor-menjadi-caleg>

<http://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-judicial-review-di-indonesia>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/169547/komisi-ii-ancam-gulirkan-hak-angket-soal-pkpu-202018.html>